

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dasarnya perusahaan bisnis memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip ekonomi yakni mencari laba yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut selain membutuhkan dukungan dari pihak dalam perusahaan, dukungan dari pihak luar yaitu lingkungan yang berada di sekitar perusahaan tersebut juga sangat diperlukan. Perusahaan dituntut tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga masalah keberlanjutan bisnis yaitu dengan menjaga hubungan yang baik dengan para *stakeholder*. Di sisi lain perusahaan juga turut membantu pemerintah untuk bersinergi dalam melakukan pembangunan. Perlu ada kerjasama diantara ketiga aktor yaitu perusahaan, pemerintah, dan masyarakat atau yang disebut dengan kemitraan (Putera, 2007).

Melaksanakan tanggung jawab sosial yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan salah satu langkah yang dapat diambil untuk memperoleh hubungan baik dengan pihak luar perusahaan. Menurut (Wibisono, 2007) *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu komitmen berkelanjutan di dalam dunia usaha. Komitmen ini sebagai tindakan etis dan turut ikut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat atau komunitas setempat, juga membantu menaikkan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.

Peranan BUMN dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan juga memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Peran tanggung jawab sosial BUMN dituangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-05/MBU/2007

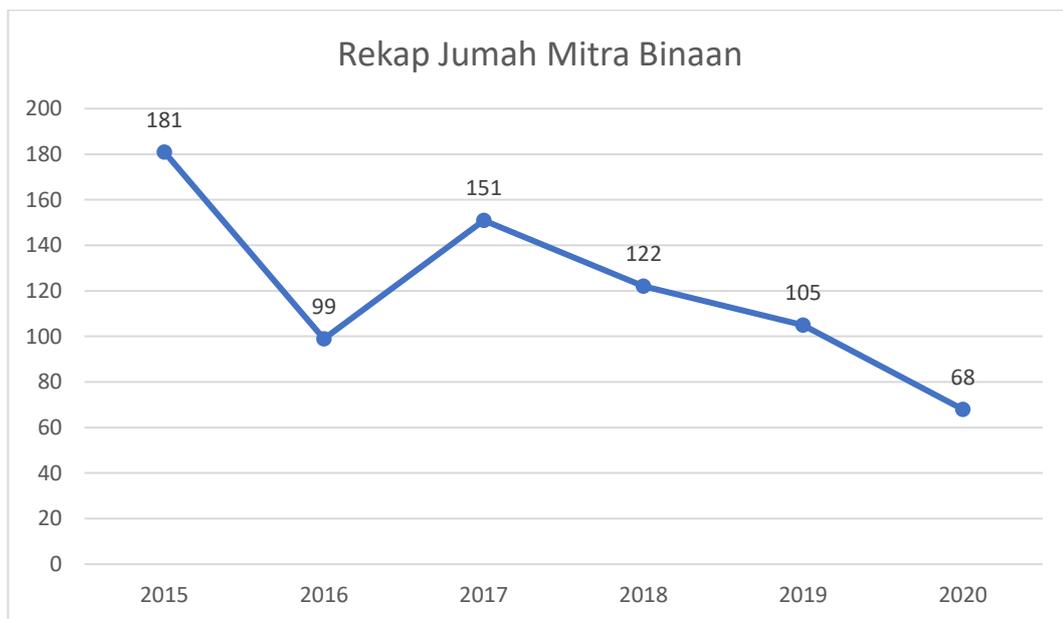
tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

PT. Telkom merupakan salah satu perusahaan BUMN berusaha untuk memainkan perannya sebagai perusahaan milik negara yang bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan dan sosialnya. Telkom berusaha membangun kepercayaan dengan menggunakan strategi pengembangan program-program CSR. Telkom juga telah berpikir untuk tidak lagi bekerja hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi lebih cenderung mengarah kepada pembangunan keberlanjutan usaha jangka panjang serta memberdayakan masyarakat (*community development*).

Menurut (Hayden, 1979) *community development* adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. Pengembangan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat, agar mereka dapat hidup lebih baik dalam arti mutu atau kualitas hidupnya. Prinsip pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah partisipatif yaitu program pengembangan masyarakat (*community development*) harus memaksimalkan keterlibatan banyak orang dalam proses dan kegiatannya. Dengan demikian, kepemilikan program dan inklusifitas bisa terjadi. Seringkali kita menganggap bahwa partisipasi itu berarti dalam bentuk ikut dalam pertemuan dan kegiatan yang ada dalam program kita, atau masyarakat bersedia menjadi

relawan/kader dalam program kita. Padahal, cara orang berpartisipasi, tidak sama. Partisipasi sebenarnya punya arti luas, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan di luar kegiatan program tetapi sebenarnya juga berarti mendukung dan memanfaatkan hasil-hasil program, itu juga harus dianggap penting.

CSR pada PT. Telkom dikenal dengan nama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau sering disingkat dengan istilah PKBL. Program Kemitraan adalah salah satu kegiatan CSR yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri yaitu dengan memberikan kredit atau pinjaman. Program Kemitraan diperuntukkan untuk usaha kecil yang membutuhkan bantuan dana agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN untuk pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan serta pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha yang bersifat pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek yang berkaitan dengan program kemitraan serta untuk bantuan diklat, promosi atau pemasaran, dan pemagangan (*capacity building*).

Tabel 1. 1**Diagram Garis Jumlah Mitra Binaan Baru Telkom Witel Semarang
Tahun 2015-2021**

(Sumber: Data olah, 2021)

Usaha kecil yang menerima bantuan CSR Program Kemitraan Telkom disebut Mitra Binaan. Dari data diatas dapat dilihat bahwa grafik jumlah mitra binaan baru yang dibina oleh Telkom Witel Semarang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 jumlah mitra binaan bertambah sebanyak 181 orang. Pada tahun 2016 mengalami penambahan sejumlah 99 mitra binaan kemudian tahun 2017 mengalami penambahan mitra binaan sejumlah 151 mitra binaan. Hal ini mengindikasikan meningkatnya adanya persebaran informasi mengenai program kemitraan dan kepercayaan masyarakat terhadap program kemitraan PT. Telkom Indonesia. tahun 2018 jumlah mitra binaan baru bertambah sebanyak 122 mitra binaan dan tahun 2019 bertambah lagi sebanyak 105 mitra binaan baru. Pada tahun

2020 dan 2021 jumlah mitra binaan yang diterima tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, hal ini mungkin disebabkan karena adanya pandemic Covid-19. Mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2021 total usaha kecil yang menjadi mitra binaan Telkom Semarang berjumlah sebanyak 759. Selain itu, hal ini juga dapat menggambarkan menguatnya kegiatan wirausaha di wilayah Kota Semarang. Berdasarkan data di atas bertambahnya jumlah mitra binaan baru yang ikut serta dalam Program kemitraan Telkom menandakan Program Kemitraan Telkom Witel Semarang cukup banyak menarik perhatian dari UMKM Kota Semarang.

Pentingnya peranan UMKM adalah dalam penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru (Rudjito, 2003). UMKM perlu dikembangkan lantaran sector UMKM dapat menghasilkan omzet yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan industri-industri besar lainnya, sektor UMKM jauh lebih kuat bertahan pada situasi kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti saat ini. Walaupun tidak sedikit persoalan klasik yang dihadapi oleh UMKM saat ini meliputi rendahnya kegiatan produktif, rendahnya *value*, kecilnya dana investasi, target pasar yang tidak luas, relasi bisnis sangat terbatas, kurangnya akses ke sumber modal dan bahan baku, manajemen dan sumber daya manusia kurang profesional juga belum mempunyai kualitas untuk bersaing maju (Rizal 2002).

Studi pada penelitian ini adalah UMKM mitra binaan Telkom Witel Semarang yaitu Wingko O dan Andjani. Wingko “O” merupakan usaha kecil di bidang olah pangan yakni oleh-oleh Semarang yang khas yaitu wingko babat sedangkan Andjani adalah usaha kecil di bidang kerajinan tangan UMKM yang menjadi mitra binaan. Alasan peneliti memilih kedua usaha kecil ini sebagai objek

penelitian adalah berdasarkan rekomendasi dari pihak Telkom yang mengelola Program Kemitraan Telkom Witel Semarang. Selain itu, kedua usaha ini dianggap memiliki informasi yang kuat mengenai bantuan Program Kemitraan Telkom karena status pengembalian dana pinjaman Wingko “O” dan Andjani adalah lancar. Kedua UMKM ini menerima dana pinjaman dibawah Rp 20.000.000 dan termasuk ke dalam kategori lancar pada angsuran pengembalian dana pinjaman, hal ini menandakan bahwa kinerja usaha Wingko “O” dan Andjani dianggap pihak Telkom baik karena dapat mengembalikan angsuran dana pinjaman secara teratur tiap bulannya.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa banyaknya jumlah mitra binaan baru yang bertambah tiap tahunnya menandakan adanya kepercayaan UMKM kepada PT. Telkom. Hal ini sejalan dengan teori prinsip pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah partisipatif yaitu program pengembangan masyarakat (*community development*) harus memaksimalkan keterlibatan banyak orang dalam proses dan kegiatannya. Partisipasi sebenarnya punya arti luas, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan di luar kegiatan program tetapi sebenarnya juga berarti mendukung dan memanfaatkan hasil-hasil program, itu juga harus dianggap penting. Hasil evaluasi UMKM Andjani dan Wingko “O” pada laporan status laporan angsuran pengembalian dana pinjaman Program Kemitraan Telkom Witel Semarang termasuk ke dalam kategori lancar. Namun, hal ini kurang bisa menggambarkan kinerja mitra binaan ini mengalami perkembangan atau peningkatan. Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan (Tambunan, 2012) mengenai perkembangan usaha yang dipengaruhi oleh modal, pemasaran, bahan baku, tenaga

kerja, teknologi, biaya transportasi, energi yang tinggi, komunikasi, dan prosedur administrasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT. Telkom dalam meningkatkan kinerja UMKM. Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan penelitian ini mengambil judul: **“Analisis Program Kemitraan CSR PT. Telekomunikasi Indonesia Dalam Upaya Peningkatan Kinerja UMKM (Studi Pada UMKM Mitra Binaan PT. Telkom Witel Semarang)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kemitraan Telkom Semarang dalam upaya peningkatan kinerja UMKM?
2. Bagaimana perubahan yang terjadi pada UMKM setelah menjadi mitra binaan PT. Telkom?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Kemitraan CSR Telkom Witel Semarang dalam upaya peningkatan kinerja UMKM
2. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada UMKM setelah menjadi mitra binaan PT. Telkom

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bisa memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan masukan bagi PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang untuk memperbaiki dan mengevaluasi terkait pengelolaan Program Kemitraan.

2. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan wacana yang bermanfaat bagi mereka yang menaruh perhatian terhadap pelaksanaan CSR Program Kemitraan.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Berikut adalah kerangka teori yang akan dibahas pada penelitian ini:

1.5.1 Corporate Social Responsibility

CSR memiliki berbagai makna bagi para ahli hingga pelaku bisnis. Hingga saat ini pengertian CSR terus berkembang selaras dengan dinamika perubahan hidup. Menurut Wibisono (2007) dalam bukunya berjudul "Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (*Corporate Social Responsibility*)", *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah komitmen berkelanjutan dalam dunia usaha untuk bertindak etis serta memberikan bantuan pengembangan ekonomi komunitas atau masyarakat setempat, juga menaikkan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.

Sementara menurut (Widjaja & Yeremia, 2008) Tanggung jawab sosial lingkungan adalah bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan

Terbatas) dengan segala hal (*stakeholders*) baik secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan. Tujuannya untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut.

Pengertian tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh (Widjaja & Yani, 2006) yaitu CSR merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna menaikkan kualitas lingkungan dan kehidupan yang berguna bagi perserian, komunitas setempat, maupun masyarakat umum.

Sebagaimana ditunjukkan oleh (Jalal, 2008), CSR merupakan sebuah gagasan yang terus berkreasi baik dilihat dari perspektif pendekatan komponen maupun penerapannya. CSR benar-benar merupakan jalur hubungan sosial antara perusahaan dan jaringan mereka. Perusahaan yang melakukan CSR dapat merupakan hasil dari permintaan warga lokal atau berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Biadngnya juga sangat beragam dan dalam kondisi yang berbeda.

1.5.1.1 Tujuan CSR

(Budimanta et al., 2004) menjelaskan tujuan dan target dari program CSR pada hal kemajuan masyarakat yaitu:

1. Tujuan
 - a. Mendukung gerakan atau upaya pemerintah daerah terutama di tingkat desa dan masyarakat untuk menaikkan kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik di sekitar wilayah kegiatan organisasi.
 - b. Memberikan kesempatan pekerjaan & usaha kepada penduduk

- c. Membantu pengentasan kemiskinan dan kemajuan ekonomi wilayah yang masih menjadi salah satu masalah pemerintah.

2. Sasaran

- a. Mengembangkan dan menaikkan kualitas sumber daya manusia masyarakat dan pihak lainnya yang di sekitar wilayah organisasi
- b. Mengembangkan dan meningkatkan sarana atau fasilitas umum berdasarkan kebutuhan dan kemampuan wilayah
- c. Memberdayakan dan mengembangkan potensi-potensi kewirausahaan yang bergantung pada sumber daya lokal
- d. Mengembangkan kelembagaan terdekat di sekitar lokasi operasi organisasi

1.5.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh (Dowling & Pfeffer, 1975). Teori legitimasi dikemukakan yang memberikan gambaran tentang adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, maka perusahaan akan berada pada posisi terancam dimana perbedaan tersebut dikenal sebagai Legitimacy gap. Legitimasi gap akan muncul apabila perusahaan tidak peka terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas perusahaan serta harapan masyarakat terhadap perusahaan dan hanya berorientasi pada menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya (Ang dan Masella, 2015). Pengungkapan CSR sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk meminimalkan

legitimasi gap melalui peningkatan kesesuaian antara operasional perusahaan dan pengharapan masyarakat.

1.5.1.3 Konsep *Community Development*

Menurut (Hayden, 1979) *community development* adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.

1.5.1.4 Prinsip *Community Development*

(Ife, 1995) mengungkapkan 22 prinsip pembangunan masyarakat yaitu:

1. Pembangunan terpadu dan seimbang.

Pembangunan masyarakat pada dasarnya harus mencakup pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, kultural, lingkungan dan personal atau spiritual.

2. Konfrontasi terhadap ketimpangan structural.

Pembangunan masyarakat harus mampu merubah adanya ketimpangan kelas maupun ketimpangan gender dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hak-hak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah pemenuhan tiap standard kehidupan, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk berpartisipasi

dalam kehidupan kultural komunitasnya, hak untuk berkembang secara mandiri dan hak untuk mendapatkan perlindungan keluarga.

4. Keberlanjutan.

Dua aspek penting dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan adalah pentingnya pembangunan tersebut memperhatikan dimensi keseimbangan ekologis dan keadilan sosial.

5. Pemberdayaan.

Konsep pemberdayaan menjadi basis utama dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan mereka untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka.

6. Pembangunan personal dan politik.

Pembangunan masyarakat pada hakekatnya perlu untuk menyeimbangkan hubungan antara personal dan politik, individu dan struktur maupun personal, privat dan publik.

7. Pemilikan komunitas.

Pemilikan komunitas mencakup dua level, yaitu kepemilikan pada sebuah benda material dan kepemilikan pada struktur serta proses.

8. Kemandirian.

Kemandirian memiliki makna bahwa komunitas seharusnya mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada dengan kekuatan sendiri dan tidak bergantung pada pihak eksternal. Kemandirian komunitas akan sangat bermanfaat dalam menghadapi ketidakpastian dan krisis.

9. Independen dari Negara.

Hal ini tidak berarti bahwa dukungan pemerintah tidak perlu diterima. Dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk memulai proses pembangunan masyarakat.

10. Tujuan dekat (antara) dan visi akhir jangka panjang.

Dalam pembangunan masyarakat adalah sangat penting dan essential untuk menjaga keseimbangan antara tujuan dekat dan tujuan akhir jangka panjang. Hal ini selaras dengan prinsip ekologis dan prinsip keadilan sosial seperti yang telah diuraikan di muka

11. Pembangunan organik

Pembangunan organik pada dasarnya menjadi suatu konsep yang berlawanan dengan pembangunan yang bersifat mekanistik.

12. Pengembangan bertahap

Konsekuensi logis dari konsep pembangunan organik adalah adanya suatu keharusan bahwa suatu proses pembangunan harus melalui beberapa tahapan. Dengan demikian, pembangunan masyarakat memerlukan proses waktu yang lama, sebab ia lebih mengutamakan keaktifan dari partisipasi komunitas.

13. Bebas dari tekanan luar

Pembangunan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, ketika ada tekanan-tekanan dari pihak eksternal. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat haruslah dibangun secara murni oleh komunitas itu sendiri dengan memperhatikan sensitivitas terhadap budaya komunitas lokal, tradisi dan lingkungan.

14. Pembangunan komunitas

Semua pembangunan masyarakat seharusnya bertujuan untuk membangun komunitas. Pembangunan komunitas meliputi semua interaksi sosial dengan komunitas dan membantu mereka untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi jalan untuk menuju dialog yang murni, pemahaman dan aksi sosial.

15. Proses dan hasil

Penekanan pada proses dan hasil menjadi issue utama dalam kerja komunitas. Pendekatan pragmatis cenderung hanya akan melihat hasil, sehingga bagaimana upaya untuk memperoleh hasil tersebut tidaklah begitu penting. Dalam konteks ini, moral dan etika dalam memperoleh hasil akan menjadi pusat perhatian.

16. Integritas proses

Integritas dalam proses akan menjadi unsur penting dalam menentukan hasil dan tujuan. Proses bimbingan sosial masyarakat mengandung dua unsur pokok yaitu perencanaan dan pengintegrasian masyarakat yang dapat memperlancar penumbuhan kesadaran akan loyalitas kepada masyarakat dimana perorangan, peningkatan perasaan tanggungjawab terhadap kondisi serta kedudukan masyarakat.

17. Tanpa kekerasan.

Pada konteks ini, pembangunan masyarakat menghendaki sebuah proses pendekatan yang anti kekerasan.

18. Inklusif

Aplikasi prinsip inklusif dalam pembangunan masyarakat membutuhkan proses adanya keterlibatan masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pelaksanaan pembangunan.

19. Konsesus

Prinsip anti kekerasan dan pendekatan inklusif memerlukan proses pembangunan masyarakat yang seharusnya dibangun atas dasar konsesus dan keputusan konsesus tersebut seharusnya dibuat untuk dapat diaplikasikan. Pendekatan konsesus pada hakekatnya didasarkan pada persetujuan dari masyarakat dan hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip anti kekerasan dan inklusif. Dengan prinsip ini, diharapkan tidak ada menganalisa dan alienasi dalam kehidupan masyarakat.

20. Kooperasi

Perspektif ekologis dan pendekatan anti kekerasan kedua-duanya menekankan pada kebutuhan struktur yang kooperatif daripada struktur yang kompetitif. Banyak dari struktur, proses dan institusi masyarakat modern dibangun atas dasar asumsi kompetisi yang baik, termasuk sistem pendidikan, ekonomi, kesibukan, pekerjaan, seni, rekreasi dan pelayanan Kesehatan

21. Partisipasi

Prinsip partisipasi yakni bertujuan mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan, meningkatkan kualitas partisipatif masyarakat dari sekedar mendukung, menghadiri, menjadi kontributor kegiatan dakwah dan menyegarkan dan meningkatkan efektifitas

22. Pembatasan (merumuskan) kebutuhan

Pengembangan masyarakat harus dapat merumuskan dan membantu masyarakat untuk mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhannya dan mempertemukannya dalam berbagai kegiatan.

1.5.2 Program Kemitraan

1.5.2.1 Konsep Program Kemitraan

Menurut Peraturan Menteri nomor PER-02/MBU/7/2017 Pasal 1 Ayat 6 dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Menurut (Rahmatullah, 2011) dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Workshop Kajian Penerapan Pasal 74 Undang-Undang PT Nomor 40 tahun 2007 dan Kaitannya dengan Pelaksanaan PKBL pada BUMN, dikemukakan bahwa peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, pada awalnya hanya mengikat pada BUMN, dengan aktivitas sosial yang lebih dikenal dengan istilah Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah dan Program Bina Lingkungan. PKBL pada dasarnya terdiri dari dua jenis yaitu program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan disebut Program Kemitraan serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar disebut program Bina Lingkungan.

1.5.2.2 Unsur-unsur Kemitraan

Kemitraan adalah suatu aktivitas yang saling menguntungkan. Banyak macam dan bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. (Bobo, 2003) menyebutkan bahwa tujuan utama kemitraan adalah pengembangan pembangunan yang berdikari dan berkelanjutan menggunakan landasan dan struktur perekonomian yang kuat dan memiliki keahlian

menggunakan ekonomi masyarakat menjadi kekuatan utama. Kemitraan mempunyai prinsip saling menguntungkan, menguatkan, dan membutuhkan:

a. Kerjasama

Kemitraan merupakan interaksi kerjasama antara usaha kecil dengan usaha besar menengah atau kedua belah pihak yang bermitra memiliki derajat yang sama.

b. Hubungan pemilik usaha kecil dengan pengusaha besar menengah

Dalam hubungan kerjasama melalui bentuk kemitraan ini dibutuhkan pelaku usaha besar atau menengah yang bisa membangun interaksi serta saling memberi keuntungan dengan pengusaha kecil sehingga pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya akan menjadi lebih andal atau kuat dalam menjalankan usaha agar kesejahteraan dapat tercapai.

c. Pembinaan dan pengembangan

Dasar yang membedakan interaksi kemitraan dengan interaksi jual-beli biasa oleh pengusaha besar dan pengusaha kecil yaitu adanya pelatihan untuk pengusaha kecil atau koperasi dari pengusaha besar. Hal ini tidak ditemukan dalam hubungan biasa. Kegiatan pelatihan pada kemitraan diantaranya pelatihan tentang mengakses modal yang lebih besar, pelatihan manajemen produk, pelatihan manajemen usaha

1.5.2.3 Tujuan Kemitraan

Menurut (Hafsah, 2000) adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut:

a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat

- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- c. Meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah nasional
- e. Memperluas lapangan kerja
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

1.5.3 Konsep Kinerja Usaha

1.5.3.1 Pengertian Kinerja Usaha

Menurut (Moerdiyanti, 2010), kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses bisnis dan pengorbanan banyak macam sumber daya manusia dan keuangan perusahaan. Apabila kinerja perusahaan meningkat, dapat dilihat dari gencarnya aktivitas perusahaan dalam rangka menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

1.5.3.3 Pengukuran Peningkatan Kinerja Usaha Kecil

Pengukuran pertumbuhan usaha dilihat melalui bertambahnya pendapatan, bertambahnya tenaga kerja, dan bertambahnya jumlah konsumen yang menggunakan produknya (Soleh, 2008).

Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan usaha kecil adalah kinerja perusahaan secara umum dan keunggulan kompetitif. Untuk mengetahui kinerja perusahaan dilakukan pengukuran terhadap pengembalian investasi, pertumbuhan, volume, laba serta karyawan pada perusahaan (Jeaning. Peter., 1997).

Para peneliti menyarankan pertumbuhan penjualan (*sales.growth*), pertumbuhan karyawan (*employment.growth*), pertumbuhan pendapatan (*income.growth*) dan pertumbuhan target pasar (*market.share.growth*) sebagai pengukuran kinerja perusahaan kecil yang paling penting (Kim dan Choi, 1994; Lee dan Miller, 1996; Luo, 1999; Miles et al, 2000; Hadjimanolis, 2000)

1.5.4 Konsep UMKM

1.5.4.1 Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008: UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

1.5.4.2 Permasalahan UMKM

Sedangkan menurut Rizal (2002) hambatan-hambatan yang biasanya dihadapi para pengusaha kecil menengah atau UKM adalah:

1. Rendahnya kegiatan produktif
2. Rendahnya *value*.
3. Kecilnya dana investasi.
4. Target pasar yang tidak luas.
5. Relasi bisnis sangat terbatas.
6. Kurangnya akses ke sumber modal dan bahan baku.
7. Manajemen dan sumber daya manusia kurang profesional juga belum mempunyai kualitas untuk bersaing maju.

1.5.5 Review Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa studi terdahulu yang bisa dijadikan sebagai penekanan tinjauan kepustakaan berkenaan dengan topik yang dipilih, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh (Urfa et al., 2013) berjudul Efektivitas Penggunaan Kredit Program Kemitraan BUMN Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada Program Kemitraan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Sub Area Malang Untuk Industri Sari Apel penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Kemitraan PT. Telkom Area Malang dengan Industri Sari Apel Brosem Kota Batu sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan industri Sari Apel Brosem Kota Batu mampu mengembalikan kredit dengan sangat baik, adanya

peningkatan jumlah produksi yang mencapai rata-rata peningkatan produksi, peningkatan jumlah penjualan jenang apel dan sari apel.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh (Asniwaty, 2010) berjudul Evaluasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* CSR PT. Pupuk Kaltim. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah output penilaian belum menunjukkan keefektivitasan pemanfaatan dana yang diterima mitra binaan lantaran hasil evaluasi program kemitraan hanya jumlah dana pinjaman yang disalurkan dan yang dikembalikan oleh mitra binaan dan untuk penyaluran dana hibah belum adanya laporan pengembangan usaha sebagai evaluasi terhadap efektivitas atau ketepatan bentuk pelatihan yang digunakan.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh (Alhempy, 2018) dengan judul penelitian Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Pada Program Kemitraan Bina Lingkungan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Pelatihan dan pembinaan secara serentak atau simultan maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha kecil pada usaha kecil mitra binaan Community Development Centre (CDC) PT. Telkom Cabang Pekanbaru. (2) Pembinaan merupakan variabel yang memiliki sumbangan atau nilai yang tertinggi terhadap perkembangan usaha kecil terutama dalam memotivasi mitra binaan. (3) Pemantauan terhadap unit usaha yang dijalankan dilakukan terhadap mitra binaan dengan cara dibimbing, diarahkan dan berbagi pengalaman untuk mengembangkan usaha yang sedang

dijalankan dimana mitra binaan bisa berbuat dan bekerja lebih teliti dan terarah serta dapat mengoreksi kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi sehingga dapat mengembangkan usaha yang sedang dijalankan.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh (Kusumadewi, 2013) dengan judul penelitian Kemitraan BUMN Dengan UMKM sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Studi Kemitraan PT. TELKOM Kandatel Malang dengan UMKM Olahan Apel di Kota Batu). Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) PT. TELKOM menurut kategori pelaksanaannya termasuk ke dalam Kelompok hijau. Program Kemitraan ini sesuai dengan model Mutualism Partnership dengan pola kemitraan inti plasma. Kemitraan ini sudah dilaksanakan secara optimal dimana pembina sudah melaksanakan kewajibannya untuk membina dengan baik sehingga UMKM sebagai mitra binaannya mendapatkan banyak manfaat. Namun dengan banyaknya manfaat ini juga dapat mengakibatkan ketergantungan bagi pihak UMKM untuk terus menempel menjadi mitra binaan PT. TELKOM Kandatel Malang. Untuk mengatasinya maka pemberian batasan maksimal suatu UMKM menjadi mitra binaan pada pelaksanaan Program Kemitraan Usaha. Batasan maksimal ini juga selain untuk memandirikan UMKM adalah untuk memberikan kesempatan kepada UMKM lain untuk menjadi mitra binaan PT. TELKOM Kandatel Malang.
- e. Penelitian yang dilaksanakn oleh (Yusrilsya & Mahalli, 2013) menggunakan judul penelitian Peranan CSR PT. Arun NGL Dalam Pengembangan UKM di

Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan program dan secara parsial program CSR PT. Arun NGL berperan signifikan di dalam pengembangan UKM 12 Desa di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan program CSR PT. Arun NGL yang meliputi bantuan kemitraan promosi produk UKM dan bantuan kemitraan bina lingkungan secara parsial berperan tidak signifikan didalam pengembangan UKM 12 Desa di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.

1.6 Definisi Konseptual

1.6.1 Corporate Social Responsibility

Menurut Wibisono (2007) dalam bukunya berjudul "Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (*Corporate Social Responsibility*)", Wibisono menjabarkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.

Menurut (Hayden, 1979) *community development* adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.

Salah satu prinsip menurut (Ife, 1995) adalah partisipasi. Prinsip partisipasi yakni bertujuan mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan, meningkatkan kualitas partisipatif masyarakat dari sekedar mendukung, menghadiri, menjadi kontributor kegiatan dakwah dan menyegarkan dan meningkatkan efektifitas

1.6.2 Program Kemitraan

Kemitraan adalah suatu aktivitas yang saling menguntungkan. Banyak macam dan bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. (Bobo, 2003) menyebutkan bahwa tujuan utama kemitraan adalah pengembangan pembangunan yang berdikari dan berkelanjutan menggunakan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeahlian menggunakan ekonomi masyarakat menjadi tulang punggung utamanya. Kemitraan mempunyai prinsip saling menguntungkan, memperkuat, dan membutuhkan:

a. Kerjasama

Kemitraan merupakan interaksi kerjasama antara usaha kecil dengan usaha besar menengah atau kedua belah pihak yang bermitra memiliki derajat yang sama.

b. Hubungan pemilik usaha kecil dengan pengusaha besar menengah

Dalam hubungan kerjasama melalui bentuk kemitraan ini dibutuhkan pelaku usaha besar atau menengah yang bisa membangun interaksi serta saling memberi keuntungan dengan pengusaha kecil sehingga pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya akan menjadi lebih andal atau kuat dalam menjalankan usaha agar kesejahteraan dapat tercapai.

c. Pembinaan dan pengembangan

Dasar yang membedakan interaksi kemitraan dengan interaksi jual-beli biasa oleh pengusaha besar dan pengusaha kecil yaitu adanya pelatihan untuk pengusaha kecil atau koperasi dari pengusaha besar. Hak ini tidak ditemukan dalam hubungan biasa. Kegiatan pelatihan pada kemitraan diantaranya pelatihan tentang mengakses modal yang lebih besar, pelatihan manajemen produk, pelatihan manajemen usaha

1.6.3 Peningkatan Kinerja Usaha

Pengukuran pertumbuhan usaha dilihat melalui meningkatnya pendapatan, karyawan, dan jumlah konsumen yang menggunakan produknya (Soleh, 2008).

1.7 Definisi Operasional

Tingkat pertumbuhan usaha diukur dengan melihat bertambahnya pendapatan, bertambahnya tenaga kerja, dan bertambahnya jumlah konsumen yang menggunakan produknya. Berikut indikator perubahan dalam melihat peningkatan kinerja yang terjadi pada kinerja UMKM binaan Telkom Semarang:

- Peningkatan modal usaha
- Melakukan inovasi produk
- Pengembangan organisasi
- Pemasaran melalui sosial media atau *e-commerce*
- Pelatihan penggunaan teknologi
- Mengikuti pameran untuk menjalin relasi
- Peningkatan omzet penjualan produk

- Pengembangan tempat usaha
- Mengembangkan pasar baru

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan adalah melalui metode kualitatif deskriptif. Menurut (Sukmadinata, 2011), tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Dalam penelitian ini berusaha menggambarkan serta menganalisis pelaksanaan Program Kemitraan CSR PT. Telkom Indonesia dalam upaya peningkatan kinerja UMKM.

Studi kasus merupakan strategi penelitian kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini untuk memperoleh wawasan pendukung dalam mendalami konsep tanggungjawab sosial Telkom. Studi kasus dalam penelitian ini adalah UMKM mitra binaan Telkom Witel Semarang.

1.8.2 Situs Penelitian dan Subyek Penelitian

1.8.2.1 Situs Penelitian

Tabel 1. 2 Situs Obyek Penelitian

No.	Nama Usaha	Alamat	Jenis Usaha	Pengajuan Pinjaman	Tanggal Penyaluran
1.	Wingko O	Jl. Pekunden Barat No. 856 A Rt.002/001	Olahan Pangan (Wingko Babat)	15.000.000	April 2018
2.	Andjani	Jl. Jeruk IV/29 RT.002/004	Kerajinan Tas Batik dan Tenun	19.500.000	Mei 2019

Sumber: Data olah, 2019

1.8.2.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak yang memahami dan terlibat dalam kegiatan CSR PT. Telkom Indonesia baik penyelenggara ataupun penerima Program Kemitraan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik menentukan informan dengan cara memilih informan dengan menjustifikasi (dianggap tahu) tentang implementasi CSR di PT. Telkom Indonesia, menunjuk satu informan kemudian menunjuk informan lain untuk mendapatkan info tambahan.

Subyek penelitian ini adalah satu orang staff unit CDC yang mengelola program CSR PT. Telkom Indonesia dan dua mitra binaan PT. Telkom Indonesia Witel Semarang.

1.8.3 Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian di UMKM mitra binaan Telkom Semarang adalah data kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moloeng, 2006).

1.8.4 Sumber Data

1. Data Primer

Data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. yang diperoleh dengan mewawancarai atau mengamati pihak-pihak yang terkait dan relevan. Data ini dikumpulkan dan diperoleh melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan mengambil data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian. Pengambilan data dilakukan melalui tanya jawab atau wawancara langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun dengan UMKM mitra binaan dan unit CDC PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang.

2. Data Sekunder

Adapun data yang diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian ini seperti melalui buku, dokumen yakni laporan tahunan dari PT. Telkom Indonesia, serta beberapa dokumen lain mengenai Program Kemitraan serta literatur dalam penelitian ini. Adapun data sekunder yang peneliti dapatkan yakni gambaran umum

perusahaan dan CSR, peraturan pemerintah mengenai CSR, serta pengembangan masyarakat.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk mendapatkan data yang valid dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Untuk mendapatkan data-data di obyek penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Teknik wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara dengan informan yakni UMKM Mitra Binaan yang dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi UMKM Mitra Binaan PT. Telekomunikasi Indonesia yang tersebar di kota Semarang. Sementara infoman lain yaitu penanggungjawab CSR Program Kemitraan yaitu Asisten Manager Unit CDC Witel Semarang dilakukan dengan mendatangi informan di kantor PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional IV di jalan Pahlawan No. 10 Kota Semarang. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data terkait tujuan penelitian yang meliputi pelaksanaan program kemitraan dalam upaya peningkatan kinerja UMKM mitra binaan Telkom Witel Semarang. Narasumber yang diwawancarai meliputi:

- a. Staff Unit CDC Telkom Witel Semarang
- b. 2 Mitra Binaan Telkom Witel Semarang

2. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti (Sanusi, 2012). Observasi dilakukan di Kantor Telkom Semarang dan mendatangi beberapa lokasi mitra binaan. Pada dasarnya observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan sebagai perbandingan dari hasil wawancara dan prosedur penyelenggaraan program kemitraan yang seharusnya. Adapun hal-hal yang akan diobservasi antara lain:

- a. Sarana dan fasilitas yang diberikan kepada mitra binaan dalam kegiatan program kemitraan
 - b. Kegiatan yang terjadi selama program kemitraan berlangsung
 - c. Interaksi antara staff unit CDC dan mitra binaan selama dan setelah program kemitraan
 - d. Kondisi terkini usaha mitra binaan
3. Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan Program Kemitraan PT. Telkom Indonesia Witel Semarang, Proposal Mitra Binaan, Surat Keputusan Direksi serta dokumen lain mengenai program kemitraan di PT. Telkom Indonesia Witel Semarang. Sumber penelusuran dokumen juga berasal dari buku serta karya ilmiah terdahulu untuk membantu peneliti dalam merumuskan dan menjawab pertanyaan penelitian.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Setelah melakukan pengumpulan data, berikut adalah urutan analisis data pada penelitian ini:

1. **Reduksi Data**, saat melakukan pengamatan, data-data yang diperoleh telah melalui seleksi ketat, lalu menuliskan ringkasan atau uraian singkat, lalu penulis menggolongkan dalam suatu pola.
2. **Penyajian Data**, penulis menyajikan data data yang telah direduksi dengan dengan bentuk tabel, gambar, serta berbagai kutipan penjelasan dari subyek penelitian merupakan bentuk penyajian data pada penelitian ini. Pengolahan data dalam penelitian data kualitatif ini menggunakan bantuan *software* NVIVO.
3. **Menarik Kesimpulan**, penulis dapat menulis kesimpulan setelah melalui penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana.

1.8.7 Kualitas Data

Sesuai (Sugiyono, 2014) pengujian legitimasi dan ketergantungan informasi dalam eksplorasi subjektif meliputi uji believability, uji adaptabilitas, uji depenabilitas, dan uji konfirmabilitas.

A. Uji Validitas

Uji kepastian atas informasi hasil pemeriksaan subjektif meliputi:

- 1) Peningkatan persepsi.

Penyebutan ulang fakta-fakta yang sudah didapat oleh penulis menandakan bahwa hubungan antara penulis dan narasumber adalah dekat terbuka dan saling percaya sehingga tidak ada lagi data yang rahasia.

2) Memperluas ketekunan dalam penelitian.

Pemeriksaan ulang informasi yang didapat untuk melihat benar atau salahnya data tersebut.

3) Triangulasi.

- a. Triangulasi sumber adalah memeriksa ulang informasi melalui beberapa narasumber.
- b. Triangulasi metode penulis adalah pengumpulan informasi dengan benar-benar melihat informasi dari sumber yang sama melalui cara pandang, kehadiran dan dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu adalah pengumpulan informasi merupakan aset yang terpenuhi pada pengumpulan yang mendasari dapat memberikan data yang khas pada pengumpulan berikutnya.

B. Uji Transferability

Transferability mengidentifikasi dengan sejauh mana hasil pemeriksaan dapat diterapkan atau dimanfaatkan dalam keadaan yang berbeda. Selanjutnya, dengan tujuan agar orang lain dapat memahami akibat dari eksplorasi dan ada kemungkinan untuk menerapkannya, ilmuwan harus membuat laporan poin demi poin, jelas, efisien, dan dapat diandalkan.

C. Uji Keandalan dan Uji Konfirmabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan mengevaluasi seluruh ukuran pemeriksaan, yang dilakukan oleh evaluator bebas. Uji konfirmabilitas secara praktis setara dengan uji reliabilitas, yaitu mencoba hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan siklus yang dilakukan. Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan unsur dari siklus eksplorasi, maka pemeriksaan tersebut telah memenuhi pedoman konfirmabilitas. Dengan cara ini, kedua tes ini secara teratur dilakukan bersamaan.